



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUMDA ANEKA USAHA KOTA MADIUN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUTRISNO
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 840921

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.795.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/160 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 299.000.000
3. Tanah Seluas 535 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 267.500.000
4. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/60 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/80 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 379.000.000
7. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
8. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
10. Tanah Seluas 332 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 211.500.000

1. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5 L Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 102.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.109.500.000

III. HUTANG

Rp. 750.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.359.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.